



Analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada Kejaksaan Negeri Karanganyar

Yeny Martha Diana

Kejaksaan Negeri Karanganyar

yenymarthadiana84@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Juli 2022

Disetujui 20 Agustus 2022

Diterbitkan 25 September 2022

Kata kunci:

Kejaksaan; Laporan keuangan; Realisasi anggaran; Belanja pegawai; Belanja barang

Keywords :

Prosecutor's office; Financial statements; Budget realization; Personnel expenditure; Goods expenditure

ABSTRAK

Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran dibutuhkan analisa untuk mengukur keberhasilan kinerja keuangan Lembaga. Pada studi ini membandingkan kinerja keuangan Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021. Penataan Laporan Keuangan Kejaksaan Negara Karanganyar menunjuk pada PP No 71 tahun 2010 tentang SAK serta teorem pengendalian keuangan yang bajik dalam pemerintahan. Jenis penelitian yang dimanfaatkan yakni kupasan deskriptif kualitatif yang bermaksud buat menganalisis informasi yang diperoleh dari laporan keuangan buat mengukur kinerja lembaga. Populasi pada riset ini merupakan segala informasi berbentuk laporan keuangan yang dipunyai oleh Kejaksaan Negara Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 8,49% dibandingi dengan kesadaran pengeluaran massa sebelumnya. Tahun 2021 mengalami peningkatan 7,25%. Perihal ini diakibatkan antara lain terdapatnya cipta belanja modal diiringi dengan kenaikan belanja benda buat menunjang kerangka strategis yang diawali pada tahun 2020, terdapatnya akumulasi pegawai dalam rangka menunjang program ataupun aktivitas dan adanya pagu tambahan tunjangan khusus (Remunerasi). Realisasi Belanja Barang tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15,60% bila dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan 2020 mengalami penurunan 1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019.

ABSTRACT

The Karanganyar District Attorney's Office in preparing the Budget Realization Report requires analysis to measure the success of the institution's financial performance. In this study, we compare the financial performance of the Karanganyar District Attorney's Office for Fiscal Years 2019, 2020 and 2021. The arrangement of the Karanganyar State Attorney's Financial Statements refers to PP No. 71 of 2010 concerning SAK and the theorem of good financial control in government. The type of research used is descriptive qualitative research which intends to analyze the information obtained from financial reports to measure the performance of the institution. The population in this research is all information in the form of financial reports owned by the Karanganyar State Prosecutor's Office. The results showed that in 2020 there was an increase of 8.49% compared to the previous year's spending awareness. In 2021 there will be an increase of 7.25%. This is due to, among other things, the creation of capital expenditures accompanied by an increase in material expenditures to support the strategic framework that began in 2020, the accumulation of employees in order to support programs or activities and the existence of an additional ceiling of special allowances (Remuneration). Realization of Goods Expenditure in 2021 has increased by 15.60% when compared to 2020, while 2020 has decreased by 1% when compared to the previous year 2019.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para pihak yang berkepentingan khususnya pemegang saham serta untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perusahaan (Pohan, 2017). Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan (Norkamsiah et al., 2017). Berdasarkan konsep periode akuntansi, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Pengukuran hasil usaha yang dicapai dapat dilakukan dengan cara menganalisis rasio keuangan (Pongoh, 2013).

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17 Massa 2003 mengenai Keuangan Negeri kalau Pimpinan Lembaga selaku pemakai taksiran/ Benda memiliki okupasi ialah merangkai serta mengantarkan visum keuangan Departemen/ Lembaga yang dipimpinnya. Kejaksaan Negara Karanganyar yakni wujud akuntansi dibawah Kejaksaan Republik Indonesia yang berkewajiban mengorganisir akuntansi serta laporan pertanggungjawaban atas penerapan kalkuasi Pemasukan serta Pengeluaran Negeri.

Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai selaku salah satu usaha pemerintah buat tingkatkan mutu visum Keuangan Departemen Negeri/ Lembaga. Perhimpunan serta Prosedur Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diset dengan Peraturan Kejaksaan Nomor. 1 Massa 2021 bertepatan pada 23 April 2021 tentang pergantian kedua atas Peraturan Jaksa Agung RI. Entitas berkedudukan di Jl. Lawu No.361 Karanganyar.

Salah satu penerapannya merupakan dengan menata visum keuangan berwujud Lapoan Kesadaran Kalkuasi, Neraca, Visum Operasional, Laporan Pergantian Ekuitas serta CALK. Penyusunan laporan keuangan bertujuan memberitahukan info perihal formasi keuangan, perfoman keuangan, serta arus kas unit yang berguna buat sebagian besar bundaran pemakai laporan keuangan dalam pembikinan pemistaran iktisad (Amtiran & Molidya, 2020).

Kasmir (2017), mengutarakan kupasan visum keuangan kalau supaya visum keuangan jadi lebih berarti sehingga bisa dijangkau oleh bermacam golongan, hingga butuh dicoba analisis laporan keuangan. Perolehan analisis laporan keuangan pula hendak membagikan data tentang kelemahan serta daya yang dipunyai industri. Dengan terdapatnya kekenduran serta kekuatan yang dipunyai, hendak terilustrasi kinerja manajemen sepanjang ini.

Industri secara periodik senantiasa menghasilkan laporan keuangan yang terbuat bagian akunting serta diberi kepada rombongan yang berkaitan, misal pemerintah, kreditor serta pihak manajemen sendiri. Berikutnya, rombongan tersebut hendak melaksanakan bikinan informasi dengan melaksanakan kalkulasi lebih terus buat mengenali apakah industri sudah menggapai tolok kinerja yang dibutuhkan ataupun belum. Laporan keuangan tersusun dari neraca, laporan r/l, laporan pergantian pokok serta laporan arus kas (Maith, 2013).

Baik serta buruknya kinerja Departemen/ Lembaga yang diliat dari bidang keuangannya dapat dirating melui visum keuangan industri yang telah diladeni pada masing- masing masa (Ariyanti, 2020). Laporan keuangan tak hanya berarti buat rombongan internal lembaga, namun pula buat pihak eksternal. Kementerian maupun Lembaga perlu berbuat uraian visum keuangan seba laporan keuangan dibuat memperhitungkan perfoma Lembaga dan mengiaskan keadaan Lembaga dari waktu yang beralih dengan masa sebelumnya. Info kinerja ini bermanfaat buat menujumkan muatan Lembaga dalam membuahkan arus kas dari asal data yang ada. Info tersebut pula bermanfaat dalam rumus anggapan tentang daya guna industri dalam menggunakan bonus asal energi (Zamrudiah, 2020).

Penataan Laporan Keuangan Kejaksaan Negara Karanganyar menunjuk pada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP dan rule pengendalian keuangan yang waras dalam pemerintahan. Visum Keuangan ini telah dipak dan dipenuhi dengan pangkalan akrual sehingga diharapkan mampu mempersembahkan info keuangan yang jernih, telliti serta bertanggungjawab.

Analisis visum keuangan ini membandingkan kinerja keuangan periode tahun 2021 dan periode sebelumnya yakni tahun 2020. Melalui berbagai nisbah keuangan yang menggambarkan performa dan kondisi Lembaga Kejaksaan Negeri Karanganyar. Rasio keuangan yang dimanfaatkan yakni : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, nisbah Aktivitas dan ratio Profitabilitas.

Cocok dengan statment tolok akuntansi keuangan Nomor 1 (perbaikan 2009) tentang penggambaran warta keuangan terdiri dari sebagian unsur, ialah:(a) laporan keadaan keuangan pada ujung massa;(b) R/L komprehensif sepanjang massa;(c) pergantian ekuitas sepanjang periode;(d) laporan arus kas sepanjang periode;(e) CALK. Sebaliknya Visum keuangan Kejaksaan Negara Karanganyar terdiri dari: Warta Kesadaran Kalkulasi, Neraca, Laporan Operasional, Warta Pergantian Ekuitas sertaCALK. Beberapa riset terdahulu yang digunakan penulis selaku referensi menurut Khairina Ariyanti (2020) dengan judul “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur

Kinerja Keuangan Pada PT. Dzaky Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk”. Sedangkan menurut Mutiara Nur’ Rahmah (2016) dengan tema “Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen Yang Terdaftar di BEI (Studi Kasus PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk)”. Sejalan dengan penelitian Hendry Andres Maith (2013) dengan judul “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada Kejaksaan Negeri Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dimanfaatkan yakni kupasan deskriptif kualitatif yang bermaksud buat menganalisis informasi yang diperoleh dari laporan keuangan buat mengukur kinerja lembaga (Sugiyono, 2017). Dalam riset ini memakai bermacam ajaran serta memandang bermacam kenyataan menimpa fenomena yang terdapat pada Kejaksaan Negara Karanganyar dengan tujuan menarangkan, meringkaskan bermacam keadaan serta bermacam suasana yang terlihat jadi objek riset bersumber pada suatu yang terjalin, setelah itu membagikan cerminan tentang keadaan, maupun suasana tersebut. Populasi pada riset ini merupakan segala informasi berbentuk laporan keuangan yang dipunyai oleh Kejaksaan Negara Karanganyar. Ilustrasi yang digunakan dalam telaah ini ialah laporan keuangan kompi sepanjang 2 tahun terakhir ialah tahun 2020 serta tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar yang sepanjang ini dalam menaksir tingkatan hasil sesuatu upaya cuma menunjuk kepada pernyataan keuangan yang dimana bisa diukur dari untung maupun kemalangan yang diperoleh dari keberlangsungan operasional Lembaga yang sudah dijalankan. Bisa dikatakan kalau lembaga tersebut belum melaksanakan analisis terhadap visum keuangan memakai metode kupasan rasio keuangan cocok dengan tolok lembaga yang berniat buat menyamakan visum keuangan dimassa yang berjalan dengan warta keuangan di periode lebih dahulu supaya bisa mengenali pertumbuhan serta kemajuan dalam keberlangsungan Lembaga tersebut. Keuntungan untuk lembaga apabila melaksanakan analisis terhadap LK dengan memakai metode analisis rasio keuangan hingga Lembaga tersebut bisa mengenali kinerja keuangan yang cocok dengan PP No 71 Massa 2010 perihal SAP serta bersumber pada asas-asas pengendalian keuangan yang layak di area pemerintahan.

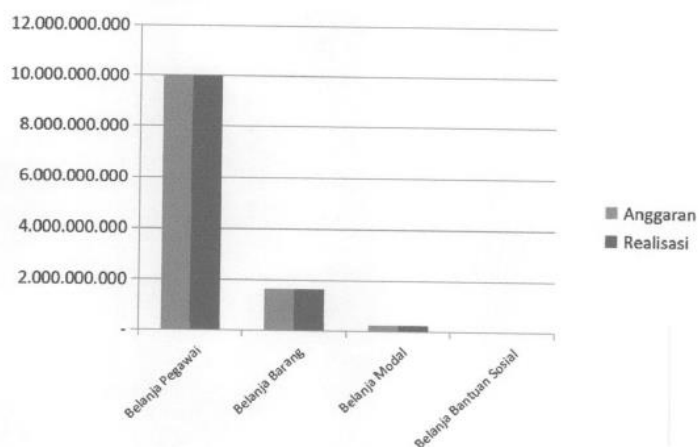
Pernyataan Reliasasi Anggaran mendiskripsikan bandingan antara kalkulasi dengan kesadaran, yang meliputi elemen pemasukan-LRA dan Pengeluaran selama masa 1 Januari-31 Desember. Kesadaran Upah Negara masa Taksiran ialah PNPB sebesar Rp. 675.935.531 atau meraih 231% dari perkiraan pendapatan-LRA sebesar Rp. 292.270.000. Sedangkan tahun sebelumnya yaitu TA 2020 Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 1.219.133.621 atau menggapai 95% dari perhitungan Rp. 1.334.779.854. Realisasi Anggaran Belanja Negara TA 2021 yaitu sebesar Rp. 11.860.542.203 /mencapai 100% dari jatah anggaran Rp. 11.862.129.000. Neraca merefleksikan keadaan keuangan entitas perihal modal, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021 atau 2020. Mutu Aseit 31 Desember dicatat dan disajikan Rp. 21.058.629.399 yang terdiri dari: milik Lancar sebesar Rp. 603.975.586; Netto sebesar Rp. 20.454.635.892; Piutang Jangka Panjang (Netto) sebesar Rp. 0; dan asset lainnya (netto) sebesar Rp. 0. Kadar Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp 62.772.152 dan Rp. 20.995.857.236.

Laporan Operasional mengajukan bermacam faktor pemasukan- LO, beban, lebihan/lemah dari pembedahan, surplus/ defisit dari aktivitas non kegiatan, surplus/ defisit saat sebelum pos luar biasa serta surplus/ defisit- LO, yang diperlukan buat penyajian yang normal. Pendapatan- LO buat masa hingga dengan 31 Desember 2021 merupakan sebesar Rp. 886. 442. 642, sebaliknya jumlah beban merupakan sebesar Rp. 12. 293. 395. 797 sehingga ada defisit dari aktivitas operasional senilai Rp.- 11. 406. 953. 155. Surplus/ defisit aktivitas non operasional serta defisit pos- pos luar biasa tiap- tiap sebesar Rp.- 40. 222. 111 serta sebesar Rp. 0 sehingga entitas hadapi Defisit- LO sebesar Rp- 11. 447. 175. 266. Laporan pergantian ekuitas menyajikan data peningkatan ataupun penyusutan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan masa lebih dahulu. Ekuitas pada bertepatan pada 1 Januari 2021 merupakan Rp. 20. 798. 700. 253 dikurangi defisit- LO sebesar Rp.- 11. 447. 175. 266 setelah itu ditambah dengan perubahan bernilai Rp. 266. 382. 000 serta dicantuman perjanjian antar uni Rp. 11. 377. 950. 249 sehingga ekuitas wujud pada bertepatan pada 31 desember merupakan Rp. 20.995.857.236.

CALK mengajukan data tentang uraian ataupun catatan rinci ataupun analisa atas kimat sesuatu pos yang meladeni dalam visum kesadaran taksiran, neraca, warta kegitan serta visum pergantian ekuitas. Tercantum pula dalam CALK merupakan presentasi data yang diwajibkan serta disarankan oleh SAP dan penyingkapan yang lainserta dibutuhkan buat penyajian yang normal atas LK. Dalam penyerahan laporan realisasi kalkuasi buat massa yang berakhir hingga dengan bertepatan pada 31 desember 2021 dipak serta dipenuhi bersumber pada pamkalan kas. Sebaliknya neraca, laporan operasional, serta laporan pergantian ekuitas buat masa 2021 dipak serta disajikan dengan alas akrual.

Kesadaran pendapatan untuk period yang berakhir pada 31 Desember 2021 ialah sebesar Rp. 675.935.531 / mencapai 231,27% dari perkiraan pemasukan yang diset Rp. 292.270.000. Sedangkan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.219.133.621 atau mencapai 417,13% dari kalkulasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 292.270.000. hal ini menunjukkan terdapat penurunan rasio realisasi pendapatan tahun 2020 ke tahun 2021 jika dibandingkan dengan estimasi pendapatan yakni $417,13\% - 231,27\% = 185,86\%$. Pendapatan Kejaksaan Negeri Karanganyar terdiri dari Upah Jasa dan Rezeki Lain-lain. Kesadran pendapatan masa 2021 mengalami penurunan sebesar 44,56% dibandingkan tahun 2020, samap seperti realisasi pendapatan tahun 2020 juga mengalami pemunduran sebesar 61,35% jika disimpulkan dengan realisasi masa 2019.

Realisasi belanja instansi tahun 2021 maupun 2020 didominasi oleh Belanja Pegawai. Selain itu terdapat belanja Barang, Belanja Modal yang jika dijumlahkan mencapai 99,9% pada tahun 2021 dan 100% pada tahun 2020 dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Adapun taksiran dan komposisi realisasi pengeluaran dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini :



Gambar 1 Sususna Kalkulasi dan Kesadaran Belanja TA 2021



Gambar 2 Komposisi Taksiran dan Realisasi Pengeluaran TA 2020

Tahun 2020 menemui peningkatan sebesar 8,49% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya. Tahun 2021 mengalami peningkatan 7,25%. Perihal ini dikarenakan antara lain adanya

pembinaan pengeluaran modal diikuti dengan kenaikan belanja item untuk menyokong pola strategis pada masa 2020, adanya perbanyakan karyawan dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dan adanya pagu tambahan tunjangan khusus (Remunerasi).

Realisasi Belanja Personil per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 merupakan tiap- tiap Rp. 9.983.627.755, Rp. 9.541.973.473 serta Rp. 8.041.684.013. Pengeluaran pegawai merupakan belanja atas kompensasi, baik dalam wujud duit ataupun benda yang diresmikan bersumber pada pp yang diberikan kepada pejabat Negeri, PNS serta pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum menjabat PNS selaku uang jasa atas karya yang sudah berbuat kecuali pekerjaan yang berikatan dengan pembuatan kapital. Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami kebangkitan sebesar 4,63% hal ini dikarenakan oleh adanya penambahan pegawai sehingga realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan, adanya pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Realisasi belanja tahun 2020 juga mengalami hal yang sama jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yakni meningkat sebesar 18,63%, hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pertumbuhan pegawai dalam rangka menyokong program, penambahan pagu tunjangan khusus karyawan (remunerasi PNS) juga menyumbang peningkatan realisasi anggaran. Berikut ini pada tabel 1 dan 2 adalah perbandingan belanja pegawai Tahun 2020 dan 2019, 2021 dan 2020 :

Tabel 1 Nisbah Pengeluaran Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Beberan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Naik/Turun (%)
Pengeluaran Gaji dan Uang Saku PNS	Rp. 5.470.863.997	Rp. 5.350.909.514	2,24
Upah Gaji dan Sokongan Non PNS	0	0	0
Belanja Uang Jasa	0	0	0
Pengeluaran Overtime	Rp. 6.668.000	Rp. 6.668.000	-
Belanja Vakasi	Rp. 4.064.441.476	Rp. 2.684.480.402	51,41
Belanja Jumlah Belanja Kotor	Rp. 9.541.973.473	Rp. 8.042.057.916	18,65
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp. 2.029.342	Rp. 373.903	442,75
Jumlah	Rp. 9.539.944.131	Rp. 8.041.684.013	18,63

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2019-2020

Tabel 2 Proporsi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Kupasan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Naik/Turun (%)
Pengeluaran Pituas dan Uang saku PNS	Rp. 5.861.974.882	Rp. 5.470.863.997	7,15
Upah Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0
Belanja upah jasa	0	0	0
Belanja Overtime	Rp. 6.748.000	Rp. 6.668.000	0
Belanja Vakasi	-	-	-
Belanja Tunjangan	Rp. 4.121.812.811	Rp. 4.064.441.476	1,41
Belanja Jumlah Belanja Kotor	Rp. 9.990.535.693	Rp. 9.541.973.473	4,70
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp. 6.907.938	-	-
Jumlah	Rp. 9.983.627.755	Rp. 9.541.973.473	4,63

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2019-2020

Kesadaran Pengeluaran Barang per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 ialah masing-masing sebesar Rp. 1.634.968.948, Rp. 1.414.369.436 dan Rp. 1.422.297.930. Realisasi Belanja Barang tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15,60% bila dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan 2020 mengalami penurunan 1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019. Berikut ini pada tabel 3 dan 4 adalah hasil perbandingan realisasi Belanja Barang :

Tabel 3 Tamsilan Pengeluaran Barang Tahun 2020 dan 2019

Tafsiran	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Naik/Turun (%)
Belanja Komoditi Operasional	Rp. 420.709.475	Rp. 404.744.685	3,94
Belanja Barang Non Operasional	Rp. 341.391.900	Rp. 386.184.338	(11,60)
Belanja Jasa	Rp. 132.525.429	Rp. 98.629.557	34,37
Belanja Pemeliharaan	Rp. 302.030.532	Rp. 284.067.250	6,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp. 170.585.000	Rp. 199.115.000	(14,33)
Belanja Barang Persediaan	Rp. 47.127.100	Rp. 49.557.100	(4,90)
Jumlah Belanja Kotor	Rp. 1.414.369.436	Rp. 1.422.297.930	(0,56)
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah	Rp. 1.414.369.436	Rp. 1.422.297.930	(0,56)

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2019-2020

Tabel 4 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020

Klarifikasi	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Naik/Turun (%)
Belanja Muatan Operasional	Rp. 425.233.726	Rp. 420.709.475	1,08
Belanja Barang Non Operasional	Rp. 606.667.379	Rp. 341.391.900	77,70
Belanja Jasa	Rp. 160.442.693	Rp. 132.525.429	21,07
Belanja Pemeliharaan	Rp. 249.013.450	Rp. 302.030.532	(17,55)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp. 148.495.000	Rp. 170.585.000	(12,95)
Belanja Barang Persediaan	Rp. 45.116.700	Rp. 47.127.100	(4,27)
Jumlah Belanja Kotor	Rp. 1.634.968.948	Rp. 1.414.369.436	15,60
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah	Rp. 1.634.968.948	Rp. 1.414.369.436	15,60

KESIMPULAN

Kejaksanaan Negeri Karanganyar dalam Menyusun laporan keuangan berbentuk Laporan Realisasi Hisab telah baik. Laporan Realisasi pemakaian anggaran telah terserap dengan baik teruji dengan penyerapan anggaran yang maksimal pada periode Tahun Anggaran 2019 sampai 2021 yang menggapai 100% dari rencana anggaran. Kenaikan anggaran diakibatkan sebab terdapatnya pengadaan belanja modal diiringi dengan kenaikan belanja benda buat menunjang rencana strategis yang diawali pada tahun 2020, terdapatnya akumulasi pegawai dalam rangka menunjang program ataupun aktivitas dan adanya pagu tambahan tunjangan khusus (Remunerasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203–214.
- Ariyanti, K. (2020). Analisis laporan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. Dzaky Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6(2), 218–226.
- Kasmir. (2017). *Analisis laporan keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Laporan Keuangan Kejaksanaan Negeri Karanganyar (2020)
- Laporan Keuangan Kejaksanaan Negeri Karanganyar (2021)
- Maith, H. A. (2013). Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Norkamsiah, N., Kesuma, A. I., & Setiawaty, A. (2017). Penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada penyusunan laporan keuangan. *Akuntabel*, 13(2), 151–163.
- Nur'Rahmah, M., & Komariah, E. (2016). Analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan

industri semen yang terdaftar di BEI (studi kasus PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk). *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 43–58.

Pohan, S. (2017). Analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan yang go public di bursa efek Indonesia. *Jurnal Mantik Penusa*, 1(1).

Pongoh, M. (2013). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan PT. Bumi Resources Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

Sugiyono. (2017). *Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Zamrudiah, Z. (2020). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju. *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 2(1), 31–59.